

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan sebuah negara selalu menginginkan generasi mudanya untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*) serta berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negaranya. Keinginan tersebut lebih tepat disebut sebagai perhatian yang terus tumbuh terutama dalam masyarakat yang demokratis. Seiring dengan perkembangan zaman untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban terjadi pergeseran nilai yang telah dicita-citakan oleh bangsa dan negara Indonesia. Pergeseran nilai dan perubahan sosial terjadi akibat berkembangnya dan mudahnya pengaksesan teknologi informasi dan komunikasi oleh warga negara yang tanpa kontrol dan terkendali.

Terdapat banyak fakta yang menunjukkan bahwa mundurnya nilai-nilai kewarganegaraan yang *Smart and Good Citizen* yang diperjelas oleh data BPS yang menyebutkan indeks demokrasi Indonesia menurun dari tahun 2015 sebesar 73,04% dan kembali menurun di tahun 2016 menjadi 72,81% dan kembali menurun di tahun 2017 menjadi 70,09% (Kompas, 19 Oktober 2017, dalam Karliani, 2017). Dalam hal ini, pada era disrupsi perkembangan teknologi dan komunikasi akan membantu dan mengefisienkan kehidupan manusia, selain itu pula dapat menggeser nilai-nilai demokratis dalam suatu bangsa akan berubah menjadi nilai individualistis, hal ini terlihat dari sikap kurang peduli terhadap orang di sekelilingnya.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat, nilai dan tanggung jawab serta partisipasi sebagai warga negara, problem perilaku mulai tampak di masyarakat dengan lahirnya penyimpangan di kalangan profesional. Misalnya vaksin palsu, penyalahgunaan obat-obatan, cepat rusaknya konstruksi bangunan umum yang mencelakai masyarakat, lahirnya *ciber crime*, kejahatan plagiarisme, manajemen konflik negatif, praktik manajemen ekonomi kapitalis, serta korupsi di kalangan birokrasi.

Kurangnya nilai-nilai (*value*) kewarganegaraan tampak dari sikap kurang peduli (*respect*) terhadap sekelilingnya. Gandal dan Finn (1992: hlm. 2), mengatakan: “*Democracy does not teach itself. If the strengths, benefits, and responsibilities of democracy are not made clear to citizens, they will be ill-equipped to defend it*”. Menurut mereka, demokrasi tidak dapat menjelaskan dirinya sendiri. Warga negara tidak akan dapat menerapkan dan melestarikan demokrasi bilamana keuntungan, kewajiban, dan kekuatan demokrasi tersebut tidak dijelaskan secara komprehensif kepada mereka. Akan hal itu diperlukan pendidikan yang baik, dimana memungkinkan warga negara dapat mengerti, menghargai, kesempatan dan tanggung jawab menjadi warga negara yang demokratis. Untuk itu dikembangkanlah *Citizenship Education* atau Pendidikan Kewarganegaraan. Menurut Gert Biesta & Robert Lawy (2006), Pendidikan Kewarganegaraan dapat dijadikan sebagai titik tolak pembelajaran aktual pada generasi muda sebagai cara untuk mempelajari dan memaknai demokrasi. Disamping itu, orientasi pembelajaran PKn dapat mewujudkan warga negara yang demokratis dan menjadikan warga negara yang baik, cerdas (*smart and good citizen*), partisipatif, dan bertanggung jawab (Wahab dan Sapriya, 2011: hal. 333-334).

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah upaya membangkitkan semangat kebangsaan generasi muda, khususnya mahasiswa. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dalam hal ini untuk memupuk kesadaran cinta tanah air, mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi saat ini sedang menuju perubahan kepada paradigma humanistik yang mendasarkan pada asumsi bahwa mahasiswa adalah manusia yang mempunyai potensi yang berbeda-beda, dan akan mempunyai potensi keilmuan dan karir sesuai dengan bidangnya masing-masing yang akan membangun bangsa Indonesia kedepannya dengan lebih demokratis. Hal ini sejalan dengan konsep yang diutarakan oleh Winataputra, (2015: 274) bahwa secara konseptual Pendidikan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang menitikberatkan pada pembinaan dan pengembangan keadaban/kebajikan/kemuliaan kewarganegaraan (*civic virtues*) yang harus

Muhamad Saleh, 2023

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS KECAKAPAN ABAD-21 UNTUK MEWUJUDKAN CIVIC ENGAGEMENT MAHASISWA
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ditampilkan dalam profil pribadi warga negara paripurna. Pembentukan sikap dan watak warga negara (*civic dispositions*) dalam hal membangun jiwa adalah membangun karakter manusia Indonesia.

Menurut Budimansyah (2010: hlm.1), inti karakter adalah menunjukkan karakter atau kebajikan (*goodness*) dalam arti berpikir baik (*thinking good*), berperasaan baik (*feeling good*), dan berperilaku yang baik (*behaving good*), yang tampak dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan. Dalam hal ini perlunya *civic skills* warga negara dalam pengembangan pengetahuan dan karakter. Komalasari (2012: hlm. 96) mengatakan bahwa dalam era globalisasi yang berdampak *life skills* akan turut mengembangkan *interdependensi*, *diferensiasi*, dan *selft regulation* yang nantinya warga negara khususnya mahasiswa mampu merefleksikan komponen tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga Pendidikan Kewarganegaraan sangat bermakna bagi kehidupan siswa.

Stanley E Dimond, seperti dikutip Somantri, (2001, hal.282) menjelaskan "*Citizenship as it relates to school activities has two-fold meanings. In a narrow-sense, citizenship includes only legal status in country and the activities closely related to the political function-voting, governmental organization, holding of office, and legal right and responsibility*"...(Citizenship sebagaimana keberhubungan dengan kegiatan-kegiatan sekolah dalam arti sempit, *Citizenship* hanya mencakup status hukum warga negara dalam sebuah negara, organisasi pemerintah, mengelola kekuasaan, hak-hak hukum dan tanggung jawab), dari perspektif ini, *Civics* dan *Citizenship* erat kaitannya dengan urusan warga negara dan negara, (Ubaedillah & Rozak, 2012: 13). Pentingnya peran kewarganegaraan yang dimuat dalam pendidikan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan akan membawa perubahan dalam demokrasi masyarakat khususnya pelibatan mahasiswa di masyarakat.

Diller (Adler&Goggin, 2005) mengatakan *civic engagement [is] an individual's duty to embrace the responsibilities of citizenship with the obligation to actively participate, alone or in concert with others, in volunteer service activities that strengthen the local community*". Dalam hal ini Diller mengungkapkan Keterlibatan warga negara adalah tugas individu untuk merangkul

Muhamad Saleh, 2023

**PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS
KECAKAPAN ABAD-21 UNTUK MEWUJUDKAN CIVIC ENGAGEMENT MAHASISWA**
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tanggung jawab kewarganegaraan dengan kewajiban untuk berpartisipasi aktif, sendiri atau bersama dengan orang lain, dalam kegiatan layanan sukarela yang memperkuat masyarakat setempat. Selanjutnya Hollister (Adler and Goggin, 2005: hlm.238) menyatakan Kewarganegaraan aktif adalah tentang tindakan kolektif lebih dari perilaku individu. Ini adalah tentang kolaborasi, tentang kegiatan bersama yang intens mengejar isu-isu komunitas melalui pekerjaan di semua sektor, bukan hanya pemerintah.

Jacoby (2009), "*we must provide oppurtunities for students to learn about and practice civic engagement so they can create their own civic identities*" dalam hal ini pendidik dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengimplementasikan peran kewarganegaraan yang terlibat langsung dalam lingkungan masyarakat. Battistoni & Levine dalam Jacoby (2009: 5-6), menegaskan bahwa pelibatan kewarganegaraan sangat begitu kompleks diantaranya; modal sosial warganegara, partisipasi, kewarganegaraan, praktik demokrasi, pelayanan publik, pemecahan masalah publik, keterlibatan/partisipasi politik, partisipasi masyarakat, tanggung jawab sosial, profesionalisme dan keadilan sosial warganegara, agen publik, pembangunan komunitas, kepemimpinan, pengembangan intelektual. Dengan kompetensi yang begitu kompleks tersebut dapat membangun negara yang demokratis sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara setara mewujudkan warga negara yang *good citizen*. Hal ini dapat diwujudkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.

Dengan pertimbangan bahwa lewat pendidikanlah yang akan melahirkan warga negara yang baik (*smart and good citizen*) yang mempunyai *skill* dan tanggung jawab moral dalam keilmuannya masing-masing yang akan di terapkan di masyarakat. Cholisin, (2005: 1) PKn (*Civic Education*) merupakan mata pelajaran yang bertugas bagaimana membentuk warga negara yang baik (*how a good citizen*). Warga negara yang baik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. David Kerr menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) sebagai berikut:

“Citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching and learning) in that preparatory process...” (1999: hlm. 7)

Dengan kesadaran akan hak dan kewajiban seorang warga negara diharapkan menjadi kritis, partisipasi dan bertanggung jawab. Tiga kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan yang membentuk karakter mahasiswa agar lebih bertanggung jawab sesuai kompetensi keilmuannya masing-masing yaitu; 1) kemampuan kewarganegaraan meliputi (kemampuan berkomunikasi, bermufakat, analisis kritis terhadap informasi politik), 2) keterlibatan kewarganegaraan (simulasi pemilu, keterlibatan dalam pemilu), 3). kesadaran akan isu dan konsep kewarganegaraan (Syvertsen et al., 2007).

Inti dari kepribadian warga negara adalah kebajikan / keadaban / kemuliaan kewarganegaraan (*civic virtues*) dan ditopang pengembangan elemen-elemennya. Secara keseluruhan kebajikan kewarganegaraan sangat diperlukan oleh setiap orang agar mau dan mampu mewujudkan partisipasi kewarganegaraan secara cerdas dan bertanggung jawab (*intelligent and responsible civic participation*), (Winataputra, 2015: 275-276). Pencapaian partisipasi kewarganegaraan (*civic participation*) sebagai tanggung jawab kewarganegaraan (*civic responsibility*).

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi mengenai Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yang dirancang untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 dikemas dan diwadahi dalam dua mata kuliah yakni pendidikan Pancasila lebih menekankan pada pendekatan filosofis-ideologis dan sosio-andragogis dalam konteks nilai ideal dan instrumental Pancasila dan UUD NRI 1945. Sedangkan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan lebih menekankan pada pendekatan psiko-andragogis dan sosio-kultural dalam konteks nilai

Muhamad Saleh, 2023

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS KECAKAPAN ABAD-21 UNTUK MEWUJUDKAN CIVIC ENGAGEMENT MAHASISWA
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

instrumental dan praksis Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai kontemporer kosmopolitanisme.

Untuk membentuk kesiapan warga negara yang akan menghadapi tantangan globalisasi dan revolusi industri 4.0 di abad-21 masyarakat Indonesia khususnya mahasiswa harus mampu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi sangat cepat, Covey (2005) menggambarkan perubahan zaman yang diikuti perubahan fenomena perilaku manusia berdasarkan tuntutan zaman tersebut. Di abad-21 dengan perkembangan teknologi yang berbasis digital akan menumbuhkan kecakapan dan keterampilan siswa, Prensky (Yong & Gates, 2014) menjelaskan “*Digital environment dramatically changes the way that young people think and process information it possibly even changes their brain structures*” dalam hal ini lingkungan digital dapat merubah proses berfikir dan mengelola informasi yang dapat merubah proses berpikir siswa/mahasiswa. Dengan demikian hal tersebut merupakan bagian dari kecakapan abad-21, dimana terdapat perbaikan secara terus menerus, manajemen, rekayasa ulang, *benchmarking*, agar dapat memenangkan persaingan dan memiliki arah serta tujuan yang jelas (Alsete, 2008).

Cogan & Derricott (1998) mengklasifikasi karakteristik yang dimiliki warga negara abad-21 terdiri atas sebagai berikut; 1) kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai masyarakat global, 2) kemampuan kerja sama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat, 3) kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya, 4) kemampuan berpikir kritis dan sistematis, 5) memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dan sebagainya), 6) kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan, 7) kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan, dan 8) kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional.

Persiapan *skill* abad-21 yang di kemukakan oleh Cogan & Derricott (1998: hlm. 13) mengarah pada karakteristik warga negara yang komprehensif menyangkut berbagai dimensi; pendidikan, politik, sosial, budaya, dan ekonomi.

Muhamad Saleh, 2023

**PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS
KECAKAPAN ABAD-21 UNTUK MEWUJUDKAN CIVIC ENGAGEMENT MAHASISWA**
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sehingga substansi Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional dan meramu materi, metode, dan model pembelajaran yang menjadi tuntutan dunia masa depan. Trilling et al., (2009) mengajukan skill yang diperlukan pada abad 21, yang disebutnya *the 21st century skills*, yaitu *Learning and innovation skills*, yang mencakup; *critical thinking and problem solving, communication and collaboration, creativity and innovation, Information Media and Technology skills* yang mencakup; *information literacy, media literacy dan ICT literacy*, selanjutnya *Life and Career Skills* yang mencakup; *flexibility and adaptability, initiative and self direction, social and cross-cultural interaction, productivity and accountability dan leadership and responsibility*.

Untuk mewujudkan kompetensi tersebut perlu adanya pengorganisasian melalui Pendidikan Kewarganegaraan dengan model, metode, strategi pada Perguruan Tinggi. Pengembangan model pembelajaran PKn yang menjadi kebutuhan di abad-21 saat ini adalah model pembelajaran yang kreatif, inovatif dan solutif, (Hosnan, 2014: hlm.87). Terdapat model kecakapan berpikir dan belajar diantaranya adalah model kecakapan pemecahan masalah (*problem solving skill*), model kecakapan berpikir kritis (*critical thinking skill*), model kolaborasi (*collaboration skill*) model kecakapan berkomunikasi (*communication skill*) dan kecakapan kreativitas (*creativity and innovation skill*). Joyce (1972) dalam Wahab, (2009: 57) fungsi dari strategi mengajar menyediakan sebuah model atau paradigma dengan mana lingkungan pendidikan dapat dibentuk yang nantinya meletakkan rencana atas mana kurikulum, atau paket-paket media dapat di kembangkan.

Pengintegrasian kompetensi dan kecakapan pembelajaran abad-21 begitu penting ke dalam pembelajaran PKn untuk membentuk pengetahuan (*civic knowledge*), keterampilan (*civic skills*), dan pembentukan sikap (*civic disposition*) untuk membentuk *civic engagement* / pelibatan warga negara khususnya mahasiswa sehingga diperlukan rancangan model dan riset yang empiris untuk menumbuhkan hal tersebut. Dalam penelitian terdahulu (Komalasari 2011: hlm. 47) menyatakan bahwa di Indonesia, saat ini pembelajaran umumnya masih menekankan pada sistem pembelajaran konvensional dan pola pembelajaran yang menggunakan konsep "*contextualized multiple intelligence*" belum berkembang secara optimal,

Muhamad Saleh, 2023

**PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS
KECAKAPAN ABAD-21 UNTUK MEWUJUDKAN CIVIC ENGAGEMENT MAHASISWA**
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sehingga dalam proses pembelajaran, guru sulit menggali kemampuan peserta didik dalam menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, artinya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak mengaitkan materi dengan realita kehidupan peserta didik, tidak kontekstual, lebih banyak memberikan kemampuan untuk menghafal, bukan untuk berpikir kreatif, kritis, dan analitis, bahkan menimbulkan sikap apatis dan menganggap enteng dan kurang menarik. Itulah sebabnya, dosen menghadapi kesulitan mengembangkan *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions* secara komprehensif.

Selanjutnya Komalasari (2017: hlm. 207) dalam hasil risetnya di tahun 2008 dengan pembelajaran kontekstual di SMP se- Jawa Barat pada aspek keterampilan warga negara (*civic skills*) sekitar 97,99% keterampilan paling tinggi dimiliki siswa. Selain pembelajaran kontekstual yang dapat meningkatkan kompetensi warga negara terdapat beberapa model pembelajaran diantaranya model *service learning* merupakan salah satu bentuk implementasi dari *experiential learning* yang dikemukakan oleh John Dewey, dia menyatakan, “*give the pupils something to do, not something to learn; and the doing is of such nature as to demand thinking; learning naturally result*” (Jenkins, Amelia, Sheehey, Patricia, 2009). Pemikiran ini didasarkan pada dua prinsip teori pengalaman (*theory of experience*), yaitu bahwa manusia dipengaruhi oleh pegalamannya dan manusia lebih dapat beradaptasi melalui belajar dari pengalaman. Ini disebut sebagai prinsip kontinuitas (*continuity*). (Lucas dan Frazier, 2014).

David Kolb juga memperkenalkan teori *experiential learning*. Kolb menyatakan bahwa belajar adalah proses dimana pengetahuan diciptakan melalui transformasi pengalaman, dan pengetahuan merupakan kombinasi dari mendapatkan dan mentransformasi pengalaman (Kolb, 2008; McLeod, 2013). Tujuan model pembelajaran ini selain melatih mahasiswa agar memiliki pengetahuan tentang situasi nyata dalam masyarakat dan kemampuan untuk mengatasinya, serta untuk membentuk karakter terutama agar mereka memiliki kesadaran berbela rasa atau peduli terhadap kaum yang lemah dan tersisihkan (*preferential option for the poor*). *Service learning* dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan pembelajaran dan pelayanan melalui sebuah proses refleksi.

Muhamad Saleh, 2023

**PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS
KECAKAPAN ABAD-21 UNTUK MEWUJUDKAN CIVIC ENGAGEMENT MAHASISWA**
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Selain dipandang dapat membantu mengembangkan dimensi spiritual dan sosial mahasiswa, juga jembatani kesenjangan antara teori atau ilmu yang dipelajari di kelas dan praktik nyata secara pribadi dalam kehidupan mereka di masyarakat. Model ini membantu mahasiswa untuk memiliki kemampuan kritis terutama terhadap berbagai situasi dan kondisi sosial yang mereka temukan dan hadapi dalam masyarakat yang dialami oleh komunitas mitra dimana mereka ditempatkan. Mahasiswa akan dimotivasi untuk melatih diri mereka: bagaimana mencapai kematangan intelektual dengan menghadapi berbagai persoalan nyata.

J. Eyler dan D.E. Giles Jr. (1999) menyebutkan bahwa *Service learning* memberikan keuntungan positif bagi perkembangan pribadi mahasiswa di antaranya, membantu perkembangan pribadi baik secara personal maupun interpersonal, memahami dan mengaplikasikan pengetahuan mereka, mengembangkan cara berpikir kritis, mengubah cara berpikir dan perspektif, dan membentuk karakter pribadi yang kuat sebagai warga negara. Selain itu *service learning* memberikan pengaruh yang kuat terhadap pembentukan karakter (*soft skill*) seperti kepedulian, berpikir kreatif dan kritis, leadership, membangun teamwork, dan kemampuan berkomunikasi. Dengan model ini akan mendorong pelibatan dan partisipasi kewarganegaraan mahasiswa yang akan di internalisasikan dalam sikap, dan aspek kompetensi masing-masing Prodi/Jurusan sesuai dengan keahliannya dan akan mendorong pemahaman mereka terhadap permasalahan sosial yang dikaitkan dengan potensi akademik yang dimilikinya. Selain itu masih terdapat berbagai model untuk mewujudkan *civic engagement* mahasiswa yang nantinya akan diintegrasikan ke dalam kompetensi dan kecakapan pembelajaran di abad-21 sehingga menarik untuk di kaji dan diteliti.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengembangan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis kecakapan abad-21 untuk mewujudkan *civic engagement*” mahasiswa.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas ditemukan beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yakni sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya model pembelajaran PKn di Perguruan Tinggi khususnya di universitas Halu Oleo yang membentuk kompetensi, kecakapan, dan prinsip pembelajaran di abad-21
- 2) Mahasiswa pada umumnya melaksanakan proses belajar secara konvensional dan menghafalkan teori, tetapi tidak memahami untuk apa mempelajari konsep dan belajar teori tersebut serta tidak tahu bagaimana menerapkan teori dan konsep yang dipelajarinya
- 3) Dalam memasuki abad-21 Pergeseran nilai dan perubahan sosial terjadi akibat berkembangnya dan mudahnya pengaksesan teknologi informasi dan komunikasi oleh warga negara yang tanpa kontrol dan terkendali
- 4) Pelibatan warga negara khususnya mahasiswa dari fungsinya sebagai kontrol politik berubah menjadi politik kepentingan *elite* tertentu.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian, maka rumusan masalah penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan *civic engagement* mahasiswa di Universitas Halu Oleo?
- 2) Bagaimana pengembangan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis kecakapan abad 21 untuk mewujudkan *civic engagement* mahasiswa di Universitas Halu Oleo?
- 3) Bagaimana efektifitas model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis kecakapan abad 21 terhadap *civic engagement* mahasiswa di Universitas Halu Oleo?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum Penelitian

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran umum mengenai pengembangan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan abad 21 untuk mewujudkan *civic engagement* mahasiswa di Universitas Halu Oleo Sulawesi Tenggara

1.3.2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk menganalisis konseptual model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis kecakapan abad 21 untuk mewujudkan *civic engagement* mahasiswa di Universitas Halu Oleo Sulawesi Tenggara
- 2) Menguji dan mengevaluasi pengembangan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis kecakapan abad-21 untuk mewujudkan *civic engagement* mahasiswa di Universitas Halu Oleo Sulawesi Tenggara
- 3) Menganalisis efektifitas penyelenggaraan pengembangan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis kecakapan abad 21 dalam mewujudkan *civic engagement* mahasiswa di Universitas Halu Oleo Sulawesi Tenggara

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat tentang pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan dalam memperkuat batang tubuh keilmuannya sebagai *integrated knowledge sytem* yang interdisipliner dalam hal pembelajaran PKn di abad-21 untuk membangun warga negara yang demokratis dan mewujudkan *smart and good citizen*. Dari hal tersebut, penelitian ini mempunyai manfaat dari aspek teoritis, praktis sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat teoritis

- 1) Penelitian ini dapat memperluas pengembangan keilmuan di bidang Pendidikan Kewarganegaraan dalam hal pengembangan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk mewujudkan *Civic Engagement* mahasiswa.

Muhamad Saleh, 2023

**PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS
KECAKAPAN ABAD-21 UNTUK MEWUJUDKAN CIVIC ENGAGEMENT MAHASISWA**
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- 2) Mengembangkan kerangka konseptual dan teoritik tentang PKn dalam rangka pelibatan kewarganegaraan dalam memasuki abad-21 untuk mewujudkan warga negara yang smart and good citizen
- 3) Sebagai landasan dan penyusunan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Halu Oleo, dalam hal memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang kreatif dan inovatif.

1.4.2. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan kontribusi dalam rangka mempersiapkan warga negara di era disrupsi dalam menyongsong revolusi industri 4.0 dan 5.0
- 2) Sebagai bahan kajian pengembangan kurikulum khususnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan model pembelajaran agar mendesain model pembelajaran yang kreatif kolaboratif, komunikatif, inovatif dengan menggunakan pendekatan *scientific approach*, dengan mengintegrasikan kecakapan abad-21.

1.4.3. Manfaat dari segi kebijakan

Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam hal merumuskan kebijakan dan program strategi dan model pembelajaran yang kekinian di abad-21 dalam hal menghadapi era revolusi industri 4.0

1.5. Struktur Organisasi Disertasi

Rancangan proposal disertasi ini terdiri atas susunan dan sistematika penulisan sebagai berikut:

1.5.1. Bab I Pendahuluan terdiri dari:

- 1) Latar belakang masalah penelitian; berisi gambaran secara umum tentang permasalahan kurang dan lemahnya model dan strategi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, sehingga output yang dihasilkan terhadap mahasiswa belum seutuhnya mengaplikasikan nilai-nilai dari pengalaman belajar tentang partisipasi atau keterlibatannya di masyarakat (*civic engagement*) secara utuh

Muhamad Saleh, 2023

**PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS
KECAKAPAN ABAD-21 UNTUK MEWUJUDKAN CIVIC ENGAGEMENT MAHASISWA**
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- 2) Rumusan masalah penelitian; menjelaskan tentang beberapa permasalahan asumsi atau hipotesis yang akan di teliti yaitu kurangnya pelibatan mahasiswa (*civic engagement*) dimasyarakat, kelembagaan dan sosial budaya dalam melaksanakan perannya sebagai *agen of change* dan edukasi, sehingga perlu di lakukan sebuah evaluasi dan perancangan model pembelajaran di Perguruan Tinggi serta eksperimen model agar lebih efektif.
 - 3) Tujuan penelitian; akan menguraikan secara rinci dan jelas tentang rencana hasil yang akan di teliti sesuai dengan indikator-indikator yang ada dalam rumusan masalah penelitian
 - 4) Manfaat penelitian; menjabarkan kegunaan dan manfaat hasil penelitian yang diperoleh baik secara teoritis dan praktis dalam pengembangan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan serta sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam hal merumuskan kebijakan dan program strategi dan model pembelajaran yang kekinian di abad-21 dalam hal menghadapi era revolusi industri 4.0
 - 5) Struktur organisasi disertasi; berisikan sistematika penulisan disertasi secara utuh dari Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III metode penelitian, Bab IV hasil temuan penelitian dan Pembahasan, Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi.
- 1.5.2. Bab II. Kajian Pustaka; dalam bab ini akan menjabarkan kerangka teoritis, mengenai konsep dan hakikat Pendidikan Kewarganegaraan, konsep pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, komponen materi serta kompetensinya, kompetensi dan kecakapan pembelajaran abad-21 serta konsep model yang akan di kembangkan yang ke semuanya menjadi pisau analisis dalam mengkaji pengembangan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.
 - 1.5.3. Bab III Memuat metodologi penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang jelas dan akurat, desain dan tahapan penelitian, lokasi dan sampel yang dipilih berdasarkan tinjauan teoritis yang dalam, instrumen dan teknik penelitian, serta analisis data yang relevan dengan sampel penelitian.

- 1.5.4. Bab IV akan dijabarkan hasil temuan penelitian di lapangan berupa data yang diperoleh dari instrumen penelitian baik dengan menggunakan angket, pedoman wawancara, pedoman observasi, dokumentasi yang disajikan dengan jelas dan valid setelah melalui proses analisis data kualitatif dan kuantitatif. Hasil temuan penelitian kemudian uraikan dengan teori yang relevan sehingga akan menghasilkan proposisi-proposisi yang akan nanti diasumsikan dan digeneralisasi.
- 1.5.5. Bab V dijelaskan simpulan penelitian tentang bagaimana implikasi temuan penelitian, dalil penelitian dan akan direkomendasikan pihak yang terkait dengan penelitian.